

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Solopos

Wilayah Berita : BPK

Halaman 4

BPK Nilai Pengelolaan Guru Tak Optimal

Mulai tahun ini Kemendikbud akan merekrut guru-guru SMK.

JAKARTA — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan akan menindaklanjuti catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan guru. Sebab, dari temuan BPK sepanjang 2017, pengelolaan guru dinilai belum optimal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

"Kita kawal. Intinya adalah semua yang menjadi catatan BPK itu akan kita benahi dan tindak lanjuti," kata Inspektur Jenderal Kemendikbud, Daryanto, saat ditemui di kantor BPK, Jakarta, Senin (26/2).

Menurut dia, saat ini Kemendikbud sudah memonitor semua hal terkait pengelolaan guru, mulai dari anggaran hingga pelaksanaan di lapangan. Dengan begitu, pengelolaan guru pada 2018 diharapkan bisa berjalan lebih optimal. "Semua sudah dimonitor dari mulai anggaran hingga pelaksanaan," ujar dia.

Anggota BPK Harry Azhar Azis mengatakan, BPK berencana melakukan pemeriksaan strategi pembangunan pendidikan di Kemendikbud pada periode 2017-2019. Berdasarkan pene-

lusuran sepanjang 2017, kata dia, pengelolaan guru masih belum optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Harry menduga, hal tersebut dipengaruhi karena kompetensi guru yang rendah dan ketidakmerataan guru di sejumlah daerah di Indonesia. Selain itu, program redistribusi guru yang digadang-gadang bisa menyelesaikan berbagai masalah kekurangan guru pun nyatanya tidak berjalan dengan baik. "BPK juga mendorong pemda untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD untuk pendidikan agar pengelolaan keuangan negara bisa mencapai tujuan negara dalam pemenuhan pendidikan," kata Harry.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, mulai tahun ini Kemendikbud akan merekrut guru-guru sekolah menengah kejuruan (SMK) yang berasal dari pegawai senior perusahaan-perusahaan. Hal itu dilakukan untuk menyiasati problem kekurangan guru di SMK.

"Kemarin ada kesepakatan dengan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), dimungkinkan mulai tahun ini akan merekrut guru SMK yang bersumber dari pegawai senior perusahaan," ujar Muhadjir.

Muhadjir memastikan, proses perekrutan tersebut akan tetap diseleksi

melalui ujian standar kompetensi. Jika kemudian dinyatakan lolos, mereka akan dibekali sertifikat mengajar.

"Untuk statusnya belum pasti apakah langsung PNS akan tidak. Tapi, dimungkinkan statusnya sebagai guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)," kata Muhadjir.

Selain itu, dia mengungkapkan, program keahlian ganda bagi guru pun akan tetap digelar. Rencananya, tahun ini ada sekitar 16 ribu guru yang akan mengikuti pelatihan ganda tersebut.

Muhadjir menjelaskan, program pelatihan keahlian ganda tersebut dilakukan selama satu tahun. Dia tidak sependapat jika ada yang beranggapan bahwa program keahlian ganda tersebut tidak dapat menghasilkan guru yang kompeten. "Pelatihan ganda itu satu tahun, jadi tidak perlu diragukan. Selama ini, mereka juga *kan* dibarengi dengan mengajar," kata Muhadjir.

Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud, Bahrhun, mendorong agar semua kepala sekolah di SMK bisa terus kreatif. Artinya, kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai pemimpin, tetapi juga manajer yang berobsesi menghasilkan keuntungan. "Profit atau keuntungan itu *kan* bukan hanya soal materi, tapi juga hal lain. Nah, untuk kepala sekolah SMK, profitnya apa? Yaitu menghasilkan lulusan siswa yang berkompeten dan laku di pasaran," kata Bahrhun.

Kepala sekolah, Bahrhun melanjutkan

kan, harus bisa menghasilkan berbagai inovasi dan regulasi kebijakan untuk mencapai profit atau keuntungan yang dimaksud. Meskipun, dia meyakini, berbagai kendala kerap mengadang usaha sekolah dalam mewujudkan lulusan yang berkompeten.

Bahrhun mengumpamakan, ketika kekurangan kelas atau sarana prasana, kepala sekolah yang kreatif dan inovatif akan terus berupaya mencari solusi, seperti melakukan proses belajar di alam terbuka jika ruangan kelas tidak ada ataupun bekerja sama dengan industri untuk bisa memberi porsi lebih dalam hal praktikum. "Dan, itu sudah ada yang melakukan di beberapa sekolah. Tapi, ya tetap bergantung dari kreativitas kepala sekolahnya," kata Bahrhun.

Mengenai revitalisasi SMK, Bahrhun mengaku telah melakukan pembenahan di berbagai lini, termasuk kepala sekolah. Kendati demikian, belum semua kepala sekolah bisa *survive* dalam menjalankan amanat untuk terus melakukan perubahan.

Karena itu, dia berharap pemerintah daerah dan seluruh pemangku kewenangan pendidikan dapat memberi perhatian lebih terhadap siswa SMK. Sebab, jika revitalisasi dan pembenahan SMK bisa berjalan optimal, lulusan SMK dijamin bisa memiliki kompetensi yang baik dan siap menghadapi tantangan global.

■ gumanti awaliyah ed: eh ismail